

FAKTOR SOSIAL EKONOMI, KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN UNTUK Mendukung Pengembangan Pertanian DI KAWASAN PLG

Rachmadi Ramli

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah

ABSTRAK

Inpres No.2/2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG bertujuan untuk mendayagunakan kembali sumberdaya di kawasan PLG yang saat ini relatif terlantar. Substansi memberdayakan sumberdaya dengan mengembangkan produksi komoditas pertanian. Kenyataan menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar transmigran telah banyak meninggalkan lokasi, namun sebagian masih bertahan dengan mengandalkan usahatani sebagai sumber pendapatannya. Diperlukan perencanaan yang komprehensif menyangkut faktor teknis dan sosial ekonomi dan kelembagaan serta kebijakan, baik pada tingkat mikro maupun kawasan. Telah banyak hasil penelitian dan pengkajian teknologi untuk mengatasi masalah teknis dan yang dapat meningkatkan produktivitas, namun belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh petani. Masih ada faktor pendukung lainnya yang harus dipenuhi atau direvitalisasi. Makalah ini akan membahas faktor sosial ekonomi dan kelembagaan serta kebijakan yang seharusnya diciptakan dan direvitalisasi untuk mendukung pengembangan pertanian di kawasan PLG. Faktor sosial ekonomi meliputi : kemampuan ekonomi petani dalam menjalankan usahatani; pilihan komoditas, skala usaha optimal dan orientasi produksinya baik tingkat petani maupun kawasan dikaitkan dengan daya komparatif dan kompetitifnya. Faktor kelembagaan meliputi kelembagaan yang bersifat meningkatkan keterampilan petani; kelembagaan pendukung seperti penyuluhan, keuangan mikro, pengolahan hasil bagi produk yang orientasinya untuk konsumsi masyarakat setempat; kelembagaan pemasaran. Faktor kebijakan menyangkut bagaimana mengintegrasikan semua program bisa bersinergi untuk mencapai efisiensi usaha pertanian agar dapat meningkatkan daya kompetitif komoditas yang akan dikembangkan.

Kata kunci: rehabilitasi dan revitalisasi, kawasan PLG, faktor sosial ekonomi, kelembagaan dan kebijakan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1995 melalui Inpres No.82/1995 pemerintah telah membuka lahan pasang surut dengan skala luas, yang populer dengan proyek PLG sejuta hektar, namun dalam perjalanannya menghadapi masalah sehingga tidak berjalan sebagaimana rencana. Pada awal kegiatan, pengembangan beberapa usahatani

memunjukkan hasil yang cukup baik. Lambat laun kinerja pertanian di kawasan ini semakin menurun karena kurang pembinaan.

Proyek ini kemudian dihentikan dengan dikeluarkannya Keppres No.80 tahun 1998 (Tim Ad Hoc 2004), sehingga penanganan kawasan ini tidak terprogram dan terkoordinir lagi. Usahatani yang dilakukan petani berjalan tanpa pembinaan yang intensif sehingga tidak berkembang sesuai potensinya. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan, namun semua tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas.

Sumberdaya yang ditinggalkan seperti infrastruktur berupa sarana dan prasarana pengairan banyak yang kurang berfungsi lagi. Jalan darat kurang terawat, banyak yang mengalami kerusakan, sehingga memperbesar masalah yang dihadapi dalam hal ini menghambat kelancaran transportasi dan akhirnya memperbesar biaya pengangkutan barang. Rumah-rumah transmigran juga banyak yang tidak layak huni lagi. Kondisi yang kurang kondusif ini mengakibatkan banyak transmigran yang meninggalkan lokasi. Pada awal penempatan transmigran sejumlah 14.935 KK dengan 60.819 jiwa, saat ini yang masih bertahan hanya sekitar 8.327 KK (Pemda Kapuas, 2006). Mereka masih mengandalkan usahatani sebagai sumber pendapatan utama, hal ini memberi petunjuk bahwa usahatani dikawasan ini masih dapat memberikan harapan.

Sampai saat ini masih terdapat silang pendapat mengenai pendayagunaan kembali kawasan PLG. Sebagian berpendapat agar kawasan tersebut dikembalikan kepada kondisi seperti awalnya, namun sebagian berpendapat untuk dilanjutkan asal dengan pengelolaan yang tepat.

Pendayagunaan sumberdaya kawasan PLG pada dasarnya adalah membangun kembali kawasan tersebut dengan basis sektor pertanian. Pembangunan suatu kawasan merupakan kegiatan yang terencana, terpadu dan bertahap.

Pada tahun 2007 telah diterbitkan Inpres No.2/2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah (Anonim, 2007). Pada dasarnya Inpres ini sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mengembangkan kawasan tersebut secara terencana dan terpadu. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dari Inpres tersebut agar pelaksanaan pada tingkat lapangan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Pada lampiran Inpres tersebut telah ditetapkan program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta target waktunya. Program-program tersebut meliputi : konservasi, budidaya, pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigrasi, koordinasi dan evaluasi. Dua program yaitu konservasi dan budidaya menyangkut aspek tata ruang. Sedangkan substansi dari program budidaya adalah bagaimana mengembangkan komoditas-komoditas pertanian yang sesuai di kawasan tersebut untuk memperoleh pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan PLG khususnya dan masyarakat kawasan sekitarnya.

Untuk mengembangkan komoditas-komoditas pertanian di kawasan tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif agar usahatani komoditas pertanian yang dikembangkan dapat menguntungkan dan berkelanjutan.

Secara umum semua komoditas pertanian dapat dikembangkan di kawasan ini, baik tanaman perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Diperlukan pemilihan komoditas dan skala pengembangan yang tepat sesuai dengan kemampuan daya serap pasar dan untuk pemenuhan konsumsi masyarakat sendiri. Komoditas-komoditas ini dapat dikembangkan secara terpadu sehingga dapat saling bersinergi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya agar usahatani dapat kompetitif dengan daerah lain.

Telah banyak hasil penelitian dan pengkajian teknologi yang dapat mengatasi masalah produksi dan dapat meningkatkan produktivitas komoditas pertanian di kawasan ini, namun tidak semua teknologi yang dihasilkan dapat diterapkan petani atau diterapkan secara parsial sehingga penanganan masalah tidak tuntas. Masih ada beberapa faktor pendukung lain yang perlu di rekayasa ataupun direvitalisasi. Faktor-faktor pendukung yang perlu menjadi perhatian lebih besar adalah aspek sosial ekonomi serta kelembagaan petani. Untuk merekayasa dan merevitalisasi faktor-faktor pendukung ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Makalah ini akan membahas tentang faktor sosial ekonomi dan kelembagaan serta kebijakan yang diperlukan agar tujuan untuk mengembangkan komoditas pertanian di kawasan ini dapat dilakukan sesuai dengan harapan.

PERKEMBANGAN USAHATANI DAN MASALAHNYA

Kondisi Usahatani dan Masalahnya.

Data pada tahun 2006 menunjukkan bahwa lahan yang dimanfaatkan usahatani saat ini masih sangat sedikit, seperti tercantum pada Tabel 1 (Pemda Kapuas. 2006). Dibandingkan dengan potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan tanaman pangan, maka pemanfaatannya masih sangat kecil. Potensi lahan untuk pengembangan tanaman pangan yakni untuk padi (360.200 Ha); Jagung (331.400 Ha); Kedelai (331.939 Ha); Sayuran (372.129 Ha); Buah-buahan (331.400 Ha) (Distan Prov.Kal-Teng. 2007).

Bila dikaitkan dengan jumlah transmigran yang masih bertahan sekitar 8.327 KK, berarti satu KK menanam padi rata-rata sekitar satu hektar, padahal lahan usaha yang tersedia adalah dua hektar. Ini menunjukkan bahwa petani belum bisa memanfaatkan semua sumberdaya lahan yang mereka miliki.

Hampir semua petani di kawasan ini menanam padi sebagai usahatani utama, disamping mengusahakan komoditas lainnya seperti palawija dan sayuran. Ternak yang hampir semua petani memeliharanya adalah ayam buras. Sedangkan ternak

lainnya yang berkembang pada daerah-daerah tertentu seperti itik, kambing, babi, sapi dan kerbau rawa.

Tabel 1. Pemanfaatan lahan untuk usahatani di kawasan PLG

| Uraian | Luas (Ha) |
|------------------|-----------|
| Lahan pekarangan | 3.752 |
| Lahan usaha | 30.018 |
| Lahan restan | 180 |
| Tanaman padi | 9.382 |
| Palawija | 2.594 |
| Hortikultura | 1.690 |

Secara teknis pada lahan usaha, terutama pada lahan tipe A dan B, pilihan tanaman padi adalah yang paling layak saat ini diusahakan, walau secara finansial tingkat keuntungannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan usahatani lainnya. Usahatani padi ini juga relatif tidak menghadapi masalah fluktuasi harga yang berarti, dibanding dengan usahatani palawija maupun sayuran, walaupun pada masa-masa panen biasanya harga gabah rendah. Masalah ini sebenarnya dapat disikapi petani dengan menunda penjualan, namun sebagian besar petani tidak bisa melakukannya karena pada masa-masa itu memerlukan dana untuk membayar upah-upah sebagai biaya produksi, disamping untuk biaya hidup sehari-hari.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perlunya upaya menciptakan kondisi sosial ekonomi petani yang dapat mengatasi salah satu dari beberapa masalah yang dihadapi.

Pada kasus usahatani palawija dan sayuran, sering terjadi produksi palawija maupun sayuran yang melebihi jumlah permintaan pasar karena perencanaan produksi yang kurang baik sehingga mengakibatkan harga penjualan rendah. Seperti diketahui bahwa daerah-daerah produksi komoditas yang sama, juga terdapat di wilayah Kalimantan Selatan yang kadang-kadang pemasarannya masuk ke daerah Kalimantan Tengah.

Kinerja usahatani secara umum masih belum mencapai potensinya (Pemda Kapuas, 2006). Produktivitas yang bisa dicapai masih rendah seperti: padi lokal (2,5 t/ha); padi unggul (2,5-3,0 t/ha), jagung (2,5-3,5 t/ha), kedelai (1,8-2,1 t/ha), kacang tanah (1,2-1,4 t/ha), ubi jalar (8,0-12,0 t/ha), ubi kayu (20,0-25,0 t/ha).

Kinerja hasil yang masih rendah ini merupakan resultante dari masalah-masalah yang dihadapi baik masalah teknis, terlebih masalah sosial ekonomi dan kelembagaan yang belum bisa diatasi maupun belum memadai.

Diperlukan rekayasa sosial ekonomi dan kelembagaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbeda dengan usaha ternak, relatif tidak

menghadapi masalah seperti pada pemasaran palawija dan sayuran. Komoditas ini permintaannya cukup tinggi dan waktu produksinya relatif merata sepanjang waktu tidak tergantung musim. Disamping itu pemasarannya dapat ditunda untuk menunggu harga yang lebih baik.

Di kawasan ini terdapat banyak macam ternak yang diusahakan petani, tersebar pada daerah-daerah tertentu, seperti pada Tabel 2 (Dinas Peternakan Kapuas, 2004). Usaha ternak ini relatif mempunyai prospek ekonomi yang lebih besar dibanding usahatani tanaman pangan.

Untuk saling mendukung keberhasilan pengembangan khususnya usaha ternak dengan tanaman pangan, maka perlu pengaturan keterpaduan untuk mencapai sinergisme yang tinggi yang pada akhirnya untuk mencapai efisiensi yang tinggi.

Tabel 2. Macam dan jumlah ternak di kawasan PLG (ekor)

| Kecamatan | Sapi | Kerbau | Kambing | Babi | Ayam buras | Itik |
|---------------|-------|--------|---------|--------|------------|-------|
| Basarang | 909 | - | 390 | 493 | 48.193 | 410 |
| Kapuas Kuala | 810 | - | 553 | - | 104.587 | 969 |
| Kapuas Barat | 15 | - | 147 | 10.294 | 23.745 | 513 |
| Mantangai | 100 | - | 53 | 1.230 | 80.424 | 858 |
| Kapuas Murung | 560 | - | 145 | - | 125.317 | 1.183 |
| Seiat | 872 | 60 | 262 | 1.240 | 192.767 | 1.700 |
| Pulau Petak | 10 | 29 | - | 270 | 53.336 | 485 |
| Jumlah | 3.276 | 89 | 1.550 | 13.527 | 628.369 | 6.118 |

Tabel 3. Potensi kapasitas tampung ternak di kawasan PLG (ekor/tahun).

| Kecamatan | Sapi | Kerbau | Kambing | Babi | Ayam Buras | Itik |
|---------------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|
| Basarang | 5.000 | - | 3.000 | 7.500 | 75.000 | - |
| Kapuas Kuala | 5.000 | - | 5.000 | - | 75.000 | 10 jt |
| Mantangai | 25.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 75.000 | 5 jt |
| Kapuas Murung | 25.000 | 5.000 | 5.000 | - | 75.000 | 5 jt |
| Selat | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 2 jt |
| Kapuas Timur | | | 2.000 | - | 25.000 | 2 jt |
| Kapuas Hilir | | | - | 5.000 | 25.000 | 2 jt |
| Kapuas Barat | | | - | 5.000 | 25.000 | - |
| Pulau Petak | | | 2.500 | - | 25.000 | - |
| Jumlah | 65.000 | 13.000 | 27.500 | 27.500 | 425.000 | 26 jt |

Berdasarkan hasil survei, kawasan PLG yang sudah dibuka diperkirakan dapat menampung 120.000 Satuan Ternak (ST) atau setara 120.000 ekor ternak sapi potong (Dinas Peternakan Prov.Kal-Teng. 2007). Berdasarkan potensi pengembangannya, di kawasan PLG sangat besar potensinya untuk macam-macam ternak, seperti pada Tabel 3.

Potensi ini hanya bisa diwujudkan bila persyaratan pendukungnya dipenuhi, seperti ketersediaan petani/peternaknya, serta kelembagaan pendukungnya.

Sarana dan Prasarana Pendukung

Beberapa sarana dan prasarana penunjang kegiatan usahatani yang saat ini masih berfungsi seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan usahatani yang masih berfungsi di kawasan PLG

| Jenis sarana prasarana | Jumlah (satuan) |
|------------------------|-----------------|
| Hand traktor | 87 |
| Power thresher | 21 |
| Rice milling | 29 |
| Mesin tapioca | 13 |
| Pompa air | 79 |
| Hand sprayer | 400 |
| BPP | 2 |
| Balai Benih | 4 |
| Sub Lab. Hama | 1 |
| BBI | 1 |

Sarana dan prasarana ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok tani yang ada, seperti jumlah traktor dan power thresher. Demikian juga untuk pelayanan penyuluhan, saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menuntut adanya penambahan sarana dan prasarana maupun revitalisasi kelembagaan pendukung.

TINJAUAN TERHADAP INPRES No.2/2007

Aspek Teknis

Masalah dasar yang dihadapi di lahan rawa pasang surut adalah tingkat kemasaman tanah relatif tinggi yang dapat mempengaruhi keberhasilan usahatani, sehingga upaya untuk mengatasi masalah tersebut harus menjadi prioritas. Sarana dan prasarana pengairan merupakan faktor yang menentukan dari upaya tersebut.

Saat ini sarana dan prasarana pengairan banyak yang kurang berfungsi lagi. Seyogianya perbaikan sarana dan prasarana pengairan ini harus seiring dengan jadwal dan kemampuan pemanfaatannya, terutama sektor pertanian serta tenaga kerja yang tersedia sebagai unit pelaksana usahatani. Tenaga kerja yang diatur melalui program transmigrasi dengan pola penyediaan lahan usaha seluas dua hektar, ini berarti merupakan batas maksimal luas lahan yang bisa digarap.

Aspek teknis lain yang saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang pengembangan tanaman padi di kawasan Jenamas sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres No.2/2007. Kawasan ini sering menghadapi banjir sehingga tanaman padi kurang cocok dikembangkan. Walaupun secara teknis banjir dapat dikendalikan, namun memerlukan biaya besar sehingga apakah akan efisien.

Aspek Kebijakan

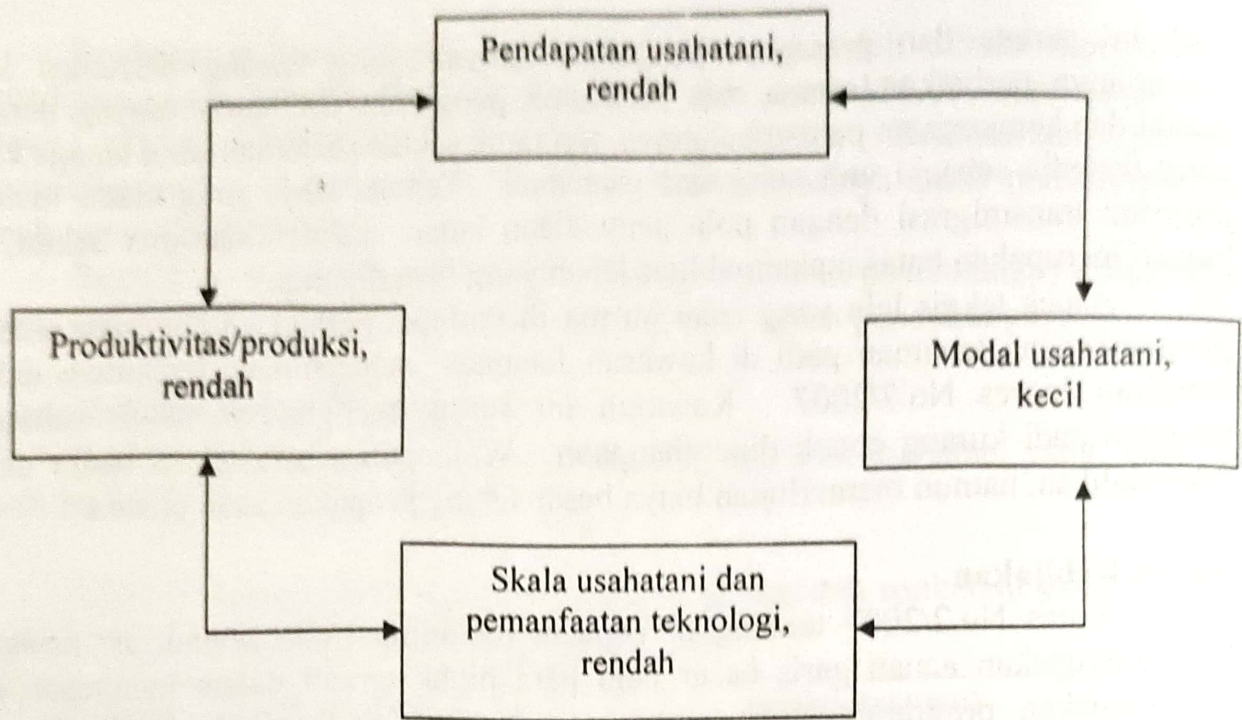
Inpres No.2/2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG merupakan acuan garis besar bagi para pihak terkait dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan untuk memberdayakan kembali sumberdaya di kawasan PLG yang terlantar selama ini.

Walaupun pada lampiran Inpres tersebut telah dimuat/dicantumkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode waktu yang telah ditetapkan. Ada empat program yaitu: konservasi, budidaya, pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigrasi, koordinasi dan evaluasi. Masing-masing keempat program ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan subsektor. Dari daftar kegiatan itu juga telah ditetapkan target-target luas/skala kegiatan. Pada sektor/subsektor pertanian target-target luas/skala kegiatan pada hakekatnya adalah luas/skala usahatani dari masing-masing komoditas yang akan dikembangkan.

Implikasi dari luas/skala usahatani ini adalah jumlah produksi yang akan dicapai. Pertanyaannya adalah apakah pilihan komoditas sudah tepat dan jumlah produksi yang akan dihasilkan sudah memperhitungkan kemampuan permintaan pasar.

Apabila pilihan komoditas dan penetapan skala usahatani sudah tepat, bagaimana mengintegrasikan program/kegiatan di lapangan agar mencapai efisiensi yang tinggi dari penggunaan sumberdaya untuk upaya meningkatkan pendapatan usahatani yang pada gilirannya bermuara kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dalam implementasi kegiatan dilapangan, selama ini lebih menonjol pendekatan pemerataan daripada pertimbangan pencapaian skala minimal usahatani yang dilakukan petani. Kenyataan menunjukkan bahwa pendekatan pemerataan akan melanggengkan ketidakmampuan petani dalam memutus lingkaran permasalahan yang dihadapi seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Lingkaran permasalahan usahatani tingkat petani

Salah satu mata rantai permasalahan adalah lemahnya kemampuan menghimpun modal usahatani yang pada dampak akhirnya adalah pada rendahnya pendapatan usahatani yang bisa diperoleh. Konsolidasi dan integrasi kegiatan khususnya kegiatan dari sektor/subsektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan modal usahatani bagi petani.

Pada hakekatnya modal usahatani diperlukan untuk membeli faktor produksi dan menerapkan teknologi. Dalam konteks ini modal usahatani bisa diwujudkan dalam bentuk natura dari kegiatan-kegiatan subsektor pertanian yang diberikan kepada petani/kelompok tani apakah dengan hibah atau pinjaman.

Dalam implementasi konsep integrasi ini perlu kesamaan persepsi para pihak bahwa pada satu petani/kelompok tani bisa menerima atau melaksanakan beberapa kegiatan dari beberapa subsektor pada satu periode waktu tertentu sampai kemampuan petani dapat menghimpun modal secara mandiri bisa tercapai. Apabila sasaran ini telah tercapai, maka paket kegiatan-kegiatan bisa dialihkan kepada petani/kelompok tani yang lain dan seterusnya.

Faktor yang perlu diperhatikan adalah pembinaan dan pengawalan yang intensif dari petugas lapangan.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK IMPLEMENTASI INPRES No.2/2007

Master Plan.

Penyusunan master plan perlu dilakukan untuk memberikan arah yang jelas bagaimana pengelolaan kawasan PLG beserta tahapan-tahapannya. Untuk membuat master plan ini beberapa langkah yang perlu dilakukan antaralain :

1. Kepastian Peruntukkan Lahan.

Karakteristik lahan menentukan kecocokan komoditas yang dikembangkan, sehingga dapat mencapai produksi sesuai potensinya. Kepastian peruntukkan lahan untuk komoditas akan berimplikasi pada penetapan kegiatan lainnya seperti penetapan perbaikan jaringan irigasi, penempatan ulang transmigran serta kegiatan lainnya.

Pada tahun 1998 Pusat Penelitian Tanah Dan Agroklimat Bogor telah melakukan survei dan pemetaan tanah tinjau mendalam (Subagjo *et al.*, 1998). Berdasarkan hasil survei tersebut telah dipetakan kelas kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas. Namun mengingat telah terjadi perubahan-perubahan sampai saat ini, maka hasil survei tersebut perlu ditinjau kembali.

Peruntukkan kawasan PLG dapat dibagi menjadi kawasan konservasi dan budidaya. Kawasan budidaya secara garis besar meliputi kawasan budidaya untuk tanaman perkebunan dan tanaman pangan serta perikanan. Sedangkan untuk pengembangan peternakan pada umumnya dapat dikembangkan bersama-sama pada kawasan perkebunan atau tanaman pangan.

Saat ini telah banyak permohonan izin untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan PLG, beberapa ada yang telah mendapatkan izin operasional. Beberapa investor lainnya masih menunggu kepastian dari penyelesaian masalah tata batas lahan.

Percepatan realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit ini akan mempercepat pertumbuhan kawasan ini. Pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan akan memacu penyerapan tenaga kerja sekaligus dapat menjadi konsumen produk-produk yang dihasilkan dari kawasan ini.

2. Penetapan Komoditas.

Walaupun secara teknis, semua komoditas bisa dibudidayakan di kawasan PLG, namun apabila akan dikembangkan secara luas maka aspek pemasarannya menjadi pertimbangan utama.

Secara ril usahatani yang dilaksanakan petani umumnya tujuan produksinya adalah semi komersial dan sepenuhnya komersial. Komoditas-komoditas semi komersial seperti padi, palawija (jagung, ubi kayu, pisang, sayuran), ternak unggas

(ayam buras, babi, itik). Sedangkan komoditas-komoditas komersial antara lain tanaman perkebunan (karet), ternak (sapi, kerbau, kambing).

Komoditas-komoditas terutama yang tujuan komersial harus memperhitungkan kemampuan daya serap pasar, juga harus bisa kompetitif dengan komoditas yang sama dari daerah lain. Kawasan PLG berada diantara pusat perekonomian seperti Banjarmasin (ibukota Provinsi Kalimantan Selatan) dan Palangka Raya (ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah) yang menjadi konsumen produk-produk pertanian dari kawasan PLG.

Daerah Banjarmasin selama ini mendapat pasokan produk pertanian dari daerah sekitarnya yang mempunyai agroekosistem relatif sama dengan kawasan PLG. Hal ini memberi implikasi bahwa produk yang sama bisa dihasilkan dari kedua kawasan tersebut, sehingga ini menjadi faktor kompetitif bagi komoditas yang dihasilkan.

Kenyataan menunjukkan bahwa daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih mendatangkan beberapa komoditas tanaman pangan seperti jagung, kedelai, kacang tanah walaupun secara teknis bisa swasembada karena memiliki lahan yang luas dan potensial untuk pengembangan komoditas tanaman pangan tersebut.

Sampai saat ini produksi komoditas tanaman pangan secara nasional, sekitar 50 persen masih berasal dari pulau Jawa dengan biaya produksi yang relatif lebih murah, sehingga lebih kompetitif.

3. Penetapan Skala Usaha Komoditas.

Apabila komoditas yang akan dikembangkan sudah ditetapkan, yang sangat penting adalah menetapkan skala/luas pengembangannya. Masalah yang mungkin timbul apabila kelebihan produksi dibandingkan kebutuhan akan mengakibatkan penurunan harga jual produksi.

Komoditas-komoditas yang rentan terhadap keseimbangan jumlah produksi dan permintaan adalah komoditas yang tidak tahan lama disimpan khususnya sayuran. Namun juga sering terjadi pada komoditas-komoditas palawija seperti jagung, kedelai dan ubi kayu. Konsumsi dalam jumlah besar terhadap komoditas tersebut adalah industri makanan dan pakan.

Saat ini industri makanan dan pakan lebih banyak berada di daerah Kalimantan Selatan yang sebenarnya juga mempunyai daerah-daerah produksi komoditas yang sama dengan di kawasan PLG.

Masalah lain yang juga masih dihadapi adalah tidak terpadunya antara waktu pasokan produksi dengan kebutuhan industri. Kebutuhan bahan baku industri selalu tetap dalam jumlah pada periode waktu tertentu.

4. Rekayasa dan Revitalisasi Kelembagaan Pendukung.

Kegiatan produksi usahatani adalah proses mengelola faktor-faktor produksi dan penerapan teknologi. Hanya faktor produksi lahan dan tenaga kerja yang sudah tersedia secara kuantitatif. Sedangkan faktor produksi lain seperti saprodi dan teknologi harus dibeli oleh petani. Merupakan masalah klasik yang dihadapi adalah bahwa umumnya petani kemampuannya terbatas untuk membeli saprodi dan teknologi.

Secara konseptual, penumbuhan kelembagaan-kelembagaan ditingkat petani adalah upaya untuk mendorong petani secara bersama-sama menggalang kemampuan yang dimiliki. Kelembagaan kelompok petani misalnya diharapkan dapat menjalankan berbagai fungsi sebagai wadah belajar, menghimpun modal bersama, penyediaan saprodi, pemasaran hasil.

Kelembagaan pendukung yang juga sangat penting peranannya adalah kelembagaan penyuluhan. Sampai saat ini secara umum kegiatan penyuluhan sangat terbatas

PENUTUP

- Sumberdaya kawasan PLG sangat besar potensinya apabila dikelola dengan benar akan memberikan manfaat besar terhadap produksi komoditas pertanian yang pada akhirnya memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan dan sekitarnya serta diharapkan memberikan kontribusi secara nasional karena sebagian komoditas yang akan dikembangkan adalah komoditas ekspor.
- Perlu kesungguhan semua pihak yang terkait baik unsur pemerintah sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan, pihak swasta yang akan menanamkan investasinya dan para petani sebagai pelaksana unit-unit produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Instruksi Presiden RI No.2/2007 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
- Disnak Kabupaten Kapuas. 2004. Potensi Pengembangan Usaha Peternakan Di Wilayah Eks.PLG Kabupaten Kapuas.
- Dinas Peternakan Prov.Kal-Teng. 2007. Proposal Pengembangan Sub Sektor Peternakan Sebagai Implementasi Inpres No.2/2007 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan PLG Di Kalimantan Tengah.

- Dinas Pertanian Prov. Kal-Teng. 2007. Rencana Aksi Inpres No.2/2007. Disampaikan Pada Rakor Tindaklanjut Inpres No.2/2007.
- Pemda Kapuas. 2006. Rencana Lokasi Panen Raya M.T Asep 2006 di wilayah eks. PLG Kabupaten Kapuas.
- Pemda Kapuas. 2004. Usulan Kegiatan Rehabilitasi Lahan PLG Lingkup Pertanian tahun 2005.
- Subagio H., A. Hidayat., Marsoedi Ds., Agus B. Siswanto., Chendy Tf., Rudi Eko S. 1998. Ringkasan eksekutif survei dan pemetaan tanah tinjau mendalam proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektar Provinsi Kalimantan Tengah. Pusat Penelitian Tanah Dan Agroklimat.
- Tim Ad Hoc. 2004. Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Eks.Proyek PLG di Kalimantan Tengah.